

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, Setara Press, Jawa Timur, 2013.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Djamaludin, *Deteksi Dini Terhadap Kegiatan Black Campaign Mampu Membangun Etika Politik*, Lemhannas, Jakarta, 2012.

Didik Supriyanto, Ramlan Subakti, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Inu Kencana Syafie, *Etika Politik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik; Teori dan Praktek*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2011.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta,

Jakarta, 2003.

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Saldi Isra, dkk, *Pemilihan Umum Serentak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Topo Santoso, Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Menegakkan Demokrasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Veri Junaidi, Fadli Ramadhani, Firmansyah Arifin, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Jurnal dan Makalah

Ali Yusri dan Adlin, *Pengaruh kampanye Negatif dan Kampanye Hitam, Terhadap Pilihan Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011*, Karya Tulis Ilmiah, 2011.

Ahmad Budiman, *Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014*, P3DI Vol. VI, No. 11, 2014.

Arfianto Purbolaksono, *Update Indonesia 2014*, Jurnal Wacana, Vol. VIII, No. 11, 2014.

Aulia, *Kampanye Hitam Dalam Pemilu Melalui Media Massa*, Rechildee Journal

Hukum, Vol. 9, No. 2, 2014.

Cleveland Ferguson, *The Politics Of Ethics, and Elections: Can Negative Campaign Advertising Be Regulated In Florida?*, Vol.24, 1997

Irwan Anjalline, R.A. Rini Angraini, Rosita Indrayati, *Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Anggota Legislatif*, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.

Keena Lipsitz, Christine Trost, Matthew Grossmann, John Sides, *What Voters Want From Political Campaign Communication*, Routledge Vol. 22, 2005.

Reza Amarta Prayoga, *Kontestalisasi Ruang Publik dan Demokrasi Dalam Relasi Simbiosis Media dan Politik*, JMP Vol.1, No. 1, 2014.

Richard R. Lau, Lee Sigelman, and Ivy Brown Rovner, *The Effect Of Negative Political Campaigns: A Meta-Analytic Reassessment*, The Journal of Politics, Vol. 69, 2007.

Sopian, *Pengaruh Kampanye Negatif Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tangerang Selatan*, Karya Tulis Ilmiah, 2011.

Tim Riset LSI, *Kampanye Negatif dan Prediksi Hasil Pileg 2014*, Surnas LSI Network, 2014

Yustis Oksa Amalia Kusuma Wardhani, Sri Hastjarjo, Sri Herwindya Baskara, *Pandangan Media Terhadap Isu Kampanye Hitam Pada Pemilihan Presiden 2014*, Studi Analisis Wacana, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia Tahun 1950.

TAP-MPRS Nomor XI Tahun 1966.

TAP-MPRS Nomor XLII Tahun 1968.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



D. Website

<https://fannyulia.wordpress.com/2014/05/05/kampanye-hitam-vs-kampanye-negatif/>

<http://kbbi.web.id/hasut>

<http://kbbi.web.id/kampanye>

<http://m.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/23/n60uaq-ini-manfaat-kampanye-negatif>.

<http://www.merdeka.com/politik/mahfud-md-janji-tak-akan-black-campaign-tapi-negative-campaign.html>.

<http://www.setianews.com/2015/02/twitwar-isu-jokowi-dua-pria-duel-di.html?m=1>

<http://www.antaraneews.com/print/135560/pakar-kampanye-negatif-cerdaskan-rakyat>

